**BAB II**

**Peran Pemerintah Indonesia Dalam Melakukan Diplomasi Budaya**

1. **Politik Luar Negeri Indonesia**

Politik Luar Negeri Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri atau dengan bangsa lain Indonesia menerapkan politik luar negeri *bebas aktif*. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Sehingga, politik luar negeri cenderung bersifat tetap, politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai pola perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internasional. Politik luar negeri diabdikan bagi kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional melainkan aktif menjalankan kebijakan luar negeri. Aktif dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Asas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dikemukakan pertama kali oleh Mohammad *Hatta* dalam keterangnnya didepan badan pekerja KNIP (*Komite Nasional Indonesia Pusat*) pada 2 September 1948. Politik luar negeri Indonesia selain bersifat bebas dan aktif juga mempunyai sifat-sifat berikut.

* Anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala hal bentuk manifestasinya dan ikut serta menjelaskan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
* Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Indonesia antara lain sebagai berikut :

* Negara Indonesia menjalankan politik damai.
* Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.
* Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri negara lain

 Pelaksanaan politik luar negeri menjadi tugas Kementerian Luar Negeri, disingkat Kemlu, (dahulu Departemen Luar Negeri, disingkat Deplu). Kementrian Luar Negeri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Untuk mewakili pemerintah Indonesia di suatu negara dibentuk Perwakilan Diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia. Orang yang melakukan kegiatan diplomatik disebu diplomat atau dutabesar.

Tugas utama seorang diplomat antara lain sebagai berikut:

* Mewakili negaranya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
* Melindungi warga negaranya di negara tempat ia bertugas.
* Memelihara dan meningkatkan hubungan internasional dengan perwakilan negara lain.
1. **Dasar Pertimbangan**

 Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan Indonesia dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak Blok Barat (Amerika Serikat) dan di pihak lain Blok Timur (Uni Soviet). Hal ini sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan atau kerja sama demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah yang kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik luar negerinya.

 Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil adalah pendirian untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan nasib sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

 Perjuangan harus dilakukan atas dasar kepercayaan terhadap diri sendiri dan kemauan untuk berjuang dengan kemampuan sendiri melalui usaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya semua warga tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif agar tidak hanyut dalam arus pertentangan bebas.

1. **Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia**

 Pada dasarnya politik luar negeri Republik Indonesia tidak mengalami perubahan. Politik luar negeri bebas aktif tetap berdasarkan pada *Pembukaan UUD 1945* dan *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RJPM)2004–2009*. RPJM di antaranya sebagai berikut.

* Menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
* Menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa.
* Menolak penjajahan dalam segala bentuk.
* Meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

 Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tanggal 14 September 1999 maka pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut.

Hal yang menjadi landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut :

* 1. **Landasan ideal/ideologis**

 Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa bangsa Indonesia mengakui semua manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia yang mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal-usul keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia atau penghisapan oleh bangsa lain, menempatkan persatuan dan kesatuan, menunjukkan bangsa Indonesia yang memiliki sifat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan menunjukkan pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial dengan mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan.

 **b. Landasan Konstitusional/UUD 1945**

* Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.
* Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan bahwa: “....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ....”
* Pasal-pasal UUD 1945:

    a) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat & menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

 (Pasal 11 ayat (1));
     b) Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat (1));
     c) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (2));
     d) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
          pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat (3)).

 **c. Landasan Operasional**

     a) Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
     b) Kebijakan presiden dalam bentuk keputusan presiden;
     c)   Kebijakan menteri luar negeri yang membentuk peraturan yang dibuat oleh menteri  luar negeri.

 **3. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia**

 Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …”
 Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut:

* mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
* memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
* meningkatkan perdamaian internasional;
* meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.

 Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional.

 Jika memperhatikan kenyataan tersebut maka upaya Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya di tingkat internasional perlu ditopang melalui pengerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi atau kerja sama antarnegara. Hal tersebut harus diantisipasi oleh Indonesia melalui kebijakan dan strategi politik luar negeri yang tepat sehingga Indonesia dapat menarik manfaat maksimal dalam hubungan internasional tersebut.

* Dalam lingkup nasional, politik luar negeri Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri.
* Dalam lingkup hubungan antardua negara (bilateral), Indonesia berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan hubungan bilateral dengan negara-negara yang dinilai berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia.
* Dalam lingkup wilayah (regional), Indonesia sangat mendukung pemulihan perekonomian Asia Tenggara dan akan berpartisipasi aktif dalam berbagai langkah ASEAN dan tetap memainkan kepemimpinan di ASEAN serta menjaga kekompakan sesama ASEAN.
* Dalam lingkup dunia (internasional), Indonesia tetap menaruh harapan besar pada PBB dan tetap meyakini keabsahan institusi ini. PBB adalah satu-satunya lembaga internasional yang paling mampu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat mendunia.

 Kebebasan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri dibuktikan oleh peningkatan hubungan regional dan internasional sebagai berikut:

1. Peran Indonesia dalam PBB;

2. Konferensi Asia Afrika (KAA);

3. Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok;

4. Peran Indonesia di ASEAN.[[1]](#footnote-2)

1. **Kepentingan Nasional dan Tujuan Nasional Negara**

Politik luar negeri Republik Indonesia baik sebagai *policies* maupun *action* senantiasa mengandung unsur kesinambungan dan perubahan yang saling berinteraksi. Hal ini meliputi nilai- nilai yang diyakini oleh masyarakat serta prinsip – prinsip yang disepakati, sementara perubahan menyangkut strategi, prioritas dan cara - cara bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional. Proses transformasi yang terjadi dari *inputs* menjadi *output* sekaligus merupakan cerminan bagaimana sebuah negara mengelolah politik luar negeri yang dipengaruhi oleh tiga faktor : lingkungan Internal/eksternal, struktur dan perilaku sosial.[[2]](#footnote-3)

Nilai – nilai dan prinsip politik luar negeri dapat digolongkan ke dalam tataran ideal. Meskipun terkadang terdapat kesenjangan, inkonsistensi atau bahkan kontradiksi dalam mentransformasikan tataran ideal ke dalam tataran operasional pasti selalu bermuara pada satu tujuan mewujudkan kepentingan nasional. Menurut Norman J. Padelford kepentingan nasional adalah :

***National interest of a country is what a governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security and economic welfare.[[3]](#footnote-4)***

Pendapat diatas mengemukakan esensi bahwa baik diplomasi maupun perang merupakan wahana (*means*) politik luar negeri yang paling lazim digunakan sebuah negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Mencermati adanya suatu aktivitas interaksi yang dibangun oleh negara dengan mitra kerjasmanya dalam keilmuan HI, selalu berlandaskan kepada nilai dan instrument dari kepentingan nasional. Sebab kepentingan nasional pada hakekatnya acuan dari setiap gerak gerik negara yang melakukan hubungan dengan negara lain. Hal ini kemudian diaplikasikan dalam bahasa politik luar negeri dalam media politik internasional seperti yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya.

Kepentingan nasional sama dengan kepentingan masyarakat, tetapi pemerintah yang kemudian diberikan kewenangan sebagai perwakilan jutaan rakyat untuk bertanggungjawab merumuskan hingga memperjuangkan kepentingan tersebut baik melalui kebijakan dalam negeri maupun luar negari. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Paul Seabury dalam tulisannya bahwa :

***Istilah kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita – cita suatu bangsa berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain, dengan kata lain gejala tersebut merupakan suatu normatif atau konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya biasa dianggap deksriptif, dalam pengertian kepentingan nasional hanya dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai negara secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif berarti memindahakan metafisika ke dalam fakta (kenyatannya). Dengan kata lain, kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri.[[4]](#footnote-5)***

Kepentingan nasional sebelum mencapai level pengaplikasian harus melalui segenap tahapan dimulai dari awal perumusan, proses persiapan, pelibatan setiap elemen pemerintah, pemanfaatan instrument yang dimiliki negara hingga faktor pendukung lainnya hingga mencapai tatanan ideal dari kepentingan nasional sebagai salah satu tujuan negara. Inilah yang menggambarkan penempatan kepentingan nasional khususnya di Indonesia tidak semudah yang diperkirakan, selain kepentingan nasional yang tentunya mencakup beragam aspek kehidupan masyarakat. Berikut dimensi kepentingan nasional meliputi :

***Kepentingan nasional biasanya meliputi kepentingan – kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan ideologi politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, pertahanan keamanan, kemampuan politik luar negeri, dan diplomasi. Kepentingan nasional memang bersifat dimensional dan masing masing dimensi berkaitan secara sistemik dalam aplikasinya.[[5]](#footnote-6)***

Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Danies S. Papp yang melihat kepentingan nasional dari sudut subjektifitas tergantung pada periode yang sedang berjalan sehingga menyebabkan kebijakan luar negeri yang diambil di setiap era pemerintahan tidak mutlak sama.

***National interest is variously defined in the contemporary era as well. Jimmy Carter believed that SALT II was in the American national interest, whereas Ronald Reagen belive otherwise. Anwar sadad argued that a modus vivendi with Israel was the best route to follow to achive Egypt’s national interest but some Egyptiansinclug those who assassinated him disagreed.[[6]](#footnote-7)***

Kepentingan nasional yang berasal dari berbagai dimensi saling berkaitan satu sama lain dan kemudian terimplikasi secara sistemik dalam bentuk pengaplikasian. Pencapainnya bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya potensi domestik suatu negara yang juga bisa diistilahkan sebagai kekuatan nasional. Faktor – faktor yang digunakan untuk mengukur skala kekuatan nasional dapat digambarkan dari mengukur besar kecilnya kepemilikan sumber daya alam dan faktor geografis suatu negara selain itu pertimbangan kekuatan bisa juga dilihat dari kemampuan industri, kesiagaan militer, populasi, kualitas diplomasi, kualitas pemerintahan, karakter dan moral nasional.

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power,* dimana kekuatan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional.

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan aktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional bagi Indonesia secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.

 Hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Turki dibangun dari dasar kontelasi kepentingan nasional keduanya dan tentu saja mengacu pada tata cara politik internasional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kepentingan nasional yang terdiri dari berbagai dimensi dan dipacu dari segenap instrument kekuatan sebagai landasan gerak menjadi salah satu tantangan peningkatan hubungan kerjasama kedua negara. Indonesia yang masih berjalan dikoridornya sebagai negara berkembang paling tidak harus bersikap visioner melihat perkembangan negara Turki sebagai negara maju dan peluang menjadi salah satu lahan pengaplikasian kepentingan nasional yang akan berimbas pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara Indonesia.

* 1. **Multy-Track Diplomacy**

Kata diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani *diploun* yang berarti melipat, menurut Nicholson pada masa kekaisaran Romawi semua paspor yang melewati jalan milik negara dan surat surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan logam ini yang akhirnya disebut dengan diplomas.[[7]](#footnote-8)

Selaras dengan perkembangan disiplin ilmu HI diplomasi kemudian dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional. Sebagai seni untuk menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan kerjasama antar negara. Diplomasi menurut definisi dari *The Oxford English Dictionary* menjelaskan sebuah tindak manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat.Versi yang mencuat dari definisi diplomasi hingga saat ini memiliki banyak variasi tergantung dari kajian keilmuan dari masing – masing pakar, tetapi paling tidak intisari dari diplomasi menunjukkan empat hal (1) politik luar negeri (2) negosiasi (3) mekanisme pelaksanaan diplomasi (4) suatu cabang dinas luar negeri.

Diplomasi dalam hubungan dengan politik Internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Hal ini didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. Tetapi terkadang diplomasi juga dihubungan dengan perang. Para pakar kemudian meletakkan tekanan pada keterkaitan antara negosiasi dan diplomasi dalam artian melakukan negosiasi tidak mesti berarti bahwa usaha yang sedang dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan satu sama lain meskipun ini sering menjadi motif utama dari suatu pertemuan yang diatur oleh negarawan atau diplomat.

Negosiasi yang dilaksanakan dalam kasus kerjasama antar negara mempunyai tujuan diplomatik jangka panjang. Diplomasi menekankan empat tujuan pokok yaitu *acquisition (*perolehan*), preservation (*pemeliharaan*), augmentation* (penambahan) dan *proper distribution* (pembagian yang adil). Selama tujuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui kepemilikan kekuatan *(power)*.[[8]](#footnote-9) Tetapi selain pertimbangan yang vital tentang keamanan nasional terdapat tujuan vital yang lain seperti memajukan kualitas perekonomian, nilai perdagangan dan asas kepentingan komersial, tindakan perlindungan warga negara sendiri di negara lain, upaya pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, serta memperoleh persahabatan dengan negara lain.

Suatu negara bisa mencapai tujuan – tujuan diplomatiknya melalui berbagai macam cara. Menurut Kautilya ini bisa dilakukan dengan penerapan satu atau kombinasi beberapa prinsip dari empat prinsip utama instrument diplomasi yaitu sama, dana, danda dan bedha-perdamaian atau negosiasi, memberi hadiah atau konsesi, menciptakan perselisihan, mengancam atau menggunakan kekuatan nyata. Instrument tersebut suatu negara akan menjalankan tiga model tingkah laku dalam berdiplomasi : *Cooperation (*kerjasama*), accommodation (*penyesuaian*) dan* opposition (pertentangan). Kerjasama dan penyesuaian bisa dicapai melalui proses negosiasi dan apabila negosiasi telah dianggap gagal mencapai tujuan secara damai maka penentangan dalam berbagai bentuk termasuk penggunaan kekuatan diambil sebagai penggantinya.

Diplomasi kini mengalami evolusi dari serangkaian modifikasi sejak pertama kali ditemukan di era klasik (*first track diplomacy*), kebutuhan akaninteraksi diluar batas negara kini tidak lagi domain kepada mereka yang memegang jabatan tertinggi dari suatu negara seperti presiden, raja, kaisar, menteri dsb. Akan tetapi perilaku diplomasi kini berkembang menjadi satu aktifitas umum yang juga diperuntukkan kepada mereka dari setiap elemen masyarakat yang memang harus melakukan aktifitas diplomasi. Pada akhirnya cabang ilmu dari diplomasi kini terbagi menjadi bagian – bagian yang subtansinya disesuaikan dengan cara pandang sekaligus tujuan konteks diplomasi di bidang tertentu dan salah satunya adalah *multi-track diplomacy.*

*Multy-track diplomacy* atau diplomasi publik menggambarkan adanya perubahan perilaku dari tingkah diplomasi yang sebelumnnya dilakukan oleh petinggi negara kini telah menjadi bagian aktifitas publik pada umumnya. Perubahan ini didasarkan bahwa pemerintah saat ini tidak lagi bisa menjawab tantangan – tantangan dari isu global yang semakin kompleks sedangkan pemerintah terkesan masih bersifat kaku. Hal ini pemerintah juga berharap diplomasi publik bisa memberikan kontribusi yang tepat dan efektif untuk memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap masyarakat internasional.[[9]](#footnote-10)

Diplomasi publik secara umum merupakan upaya untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, and influencing foreign audiences. Dengan jalan memberikan kontribusi interaksi yang sebelumnya government to government relation kini menjadi governmet to people atau bahkan people to people relation. Dimana tujuannya adalah agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas.

 Globalisasi dan revolusi tekhnologi yang terjadi dewasa ini telah membawa konsekuensi langsung pada praktik diplomasi sehingga telah mengubah tatanan dunia. Dalam bidang diplomasi, teknologi telah membuat peran diplomat menjadi kurang signifikan dibandingkan masa sebelumnya. tekhnologi, transportasi dan informasi menyebabkan waktu dan tempat kehilangan relevansinya sehingga diplomasi klasik (tradisional) sudah harus ditinggalkan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan – terobosan lain guna melengkapi aktivitas-aktivitas diplomasi jalur pertama dengan melibatkan lebih banyak masyarakat melalui aktivitas diplomasi publik.[[10]](#footnote-11)

Diplomasi publik bukan berarti menggantikan tapi melengkapi upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antar pemerintah, memberi masukan informasi – informasi penting dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Baik pemerintah maupun publik sepenuhnya memanfaatkan keahlian , pengalaman, dan sumber daya yang ada dan bekerjasama untuk mempengaruhi nilai tawar pemerintah secara signifikan. Terutama karena aktor – aktor dalam diplomasi jalur pertama memiliki karakteristik aktivitas yang berbasis kekuasaan dan interaksi yang kaku, sehingga perlu diimbangi dengan upaya – upaya yang lebih fleksibel.

Perbedaannya bahwa aktor – aktor dalam diplomasi jalur pertama (klasik) memiliki karakteristik aktivitas yang berbasis kekuasaan dan interaksi yang kaku, sehingga perlu diimbangi dengan upaya – upaya yang lebih fleksibel. Apalagi mengingat aktivitas dan pengaruh aktor bukan pemerintah telah berkembang dalam jumlah dan jenis, mulai dari kelompok kepentingan ekonomi sampai sumber daya alam, lingkungan, kemanusiaan, kriminal dan kepentingan pemerintah global lainnya. Aktor – aktor ini berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan dan menerapkan kebijakan luar negeri.

Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok – kelompok kepentingan. Sehingga diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan – persoalan politik luar negeri. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah. Karakteristik dunia seperti ini membutuhkan manajemen informasi untuk menyatukan masalah – masalah domestik dan luar negeri. Branding breakthrough sebagai sebuag bentuk branding tourism harus didukung oleh penerapan tekhnologi informasi melalui web 2.0 (e- marketing plus social media) dengan indikator tersedianya (1) tourist detail - informasi detail tentang pariwisata (2) packaging & appearance - kemasan & tampilan (3) promotion package - paket promosi dan acara (4) segment & foreign focus – menarik wisatawan dengan testimoni positif. Kontak – kontak individu tersebut dilakukan melalui tekhnologi serat optik, satelit, wireless, yang kesemuanya merupakan bagian dari sebuah jaringan yang kompleks dan tanpa pengawasan terpusat.

Maka diplomasi publik termasuk mengoptimalkan aktivitas komunikasi internasional, yaitu mengumpulkan, mengelolah dan menyebarkan informasi demi kepentingan negara. Bahan baku diplomasi adalah informasi : bagaimana memperolehnya, menganalisis, dan menempatkan pada sistem.[[11]](#footnote-12)

Diplomasi kemudian juga menjadi hirauan kelompok bisnis, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan elemen – elemen lain yang terkait pada isu – isu luar negeri. Peran media massa internasional semakin signifikan dalam tekhnologi informasi sehingga membutuhkan perubahan – perubahan dalam praktik diplomasi. Keterbukaan juga memunculkan kesadaran yang lebih tinggi untuk menetapkan standar baku bagi penunjukan duta besar karir maupun politis. Standar tersebut merupakan suatu isyarat pembaruan guna meningkatkan profesionalisme dan pelimpahan wewenang.

Oleh karena itu diplomasi tradisional / klasik dan instrumen – instrumen militer tidak lagi mencukupi untuk menyelesaikan masalah – masalah politik dan keamanan. Berhasilnya suatu kebijakan juga menuntut dukungan rakyat dan pemimpin dari negara lain. Para Diplomat harus berhasil memobilisasi dukungan yang luas bagi kebijkan luar negeri mereka, tidak hanya demi mewakili kepentingan rakyat, tapi juga konsekuensinya terhadap tekanan publik di negara lain. tekhnologi informasi memungkinkan pernyataan – pernyataan para diplomat dipublikasikan secara instan, maka penjelesan kebijakan mereka harus konsisten dan persuasif bagi rakyat di dalam dan luar negeri. Hal ini merupakan masalah politik yang jauh lebih utama daipada aktivitas hubungan masyarakat atau sekedar memperoleh citra yang positif.[[12]](#footnote-13)

Multi-track diplomacy dicetuskan pertama kali oleh Joseph Montville pada tahun 1998 yang menegaskan bahwa diplomasi tipe ini melibatkan seluruh elemen bangsa sebagai motor penggerak diplomasi. Termasuk organisasi masyarakat dan partai politik sebagai jalur diplomasi. Hal yang paling mendasar dari pendapat Joseph adalah selain negara (pemerintah) yang memang diberikan tanggungjawab menjalankan kegiatan diplomasi, efektifitas dari kegiatan tersebut harus ditunjang dari segenap elemen mayarakat yang turut berkontribusi dalam hubungan kerjasama. Dr. Louise Diamond menegaskan:

***Diplomasi multi jalur terbentuk dari hubungan komplek antara 9 faktor track diplomasi yaitu pemerintah, non pemerintah atau professional, pelaku bisnis, setiap warga negara, aktifitas riset-training-edukasi, aktifis, agama, pendanaan, terakhir komunikasi dan media. Dengan kata lain, warga negara yang berpotensi terlibat dalam pergaulan internasional menjadi bagian tak terpisahkan dari peran diplomasi internasional dengan mitra di luar negeri.[[13]](#footnote-14)***

Globalisasi dan revolusi teknologi yang terjadi sekarang ini secara tidak langsung membawa konsekuensi pada praktik diplomasi yang mengakibatkan perubahan pada tatanan dunia. Dalam bidang diplomasi teknologi pun telah membuat peran diplomat menjadi kurang signifikan dibandingkan masa - masa sebelumnya. Teknologi transportasi dan informasi menyebabkan waktu dan tempat kehilangan relevansinya sehingga diplomasi tradisional sudah harus ditinggalkan[[14]](#footnote-15) hal tersebut juga ditegaskan oleh pakar diplomasi Harold Nicholson:[[15]](#footnote-16)

**Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan peran dan fungsi seorang duta besar semakin berkurang dan diplomat – diplomat turun statusnya sebagai tenaga administrasi elit.**

Diplomasi publik bertujuan untuk menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok - kelompok kepentingan. Oleh karena itu diplomasi publik menegaskan akan kemampuan komunikasi antar budaya karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan politik luar negeri. Karena di era global seperti saat ini pendapat dari masyarakat secara efektif mempengaruhi tindakan terhadap pemerintah.

Diplomasi publik melibatkan berbagai aktor yang berasal dari bidang tertentu. misalnya dari kalangan pebisnis, warga negara biasa, kaum akademisi (Peneliti, pendidik, mahasiswa dll), organisasi non pemerintah, lembaga lembaga keagamaan, keuangan dan yang paling penting adalah media massa (pers). Pada intinya era kekinian bahwa publik memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidang yang semakin kompleks. Bagaimanapun juga misi diplomasi tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan publik.

Melihat perkembangan saat sekarang ini hubungan kerjasama yang dibangun antara Indonesia dan Turki pada konsepnya tidak harus lagi menekankan pada petinggi di instansi pemerintahan. Perubahan pada tatanan global, peningkatan kebutuhan / ekonomi, daya saing dan globalisasi kian menuntut adanya peran serta selain pemerintah utuk turut andil dalam meningkatkan hubungan kerjasama tersebut. Masyarakat dengan segenap instrument dan kajian yang dimiliki masing masing untuk bisa berperan aktif mencapai cita kepentingan nasional melalui diplomasi publik*.*

* 1. **Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Diplomasi Budaya Sebagai Alat Diplomasi**

Istilah kebudayaan dalam kajian ilmu sosial sering diidentikkan dengan nilai – nilai tradisi, adat maupun karakter dari masyarakat yang kemudian mewariskan atmosfir peradaban tersebut dari zaman sejarah. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai :

**Semua hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Karya menghasilkan teknologi kebendaan atau (material culture) yang diperlukan manusia untuk menguasai sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat dibdikan untuk kehidupan masyarakat.[[16]](#footnote-17)**

Unsur unsur kebudayaan tersebut kemudian mengalami asimilasi seiring dengan keberadaan perkembangan ilmu HI dalam kegiatan berdiplomasi yang kemudian bermuara menjadi aktifitas yang disebut diplomasi kebudayaan. Penggabungan kata tersebut secara umum menggambarkan seni interaksi dalam lingkup diplomasi tetapi dengan memanfaatkan instrument dalam estetika kebudayaan. Diplomasi kebudayaan menurut Wahyuni Kartika menjelaskan :

**Diplomasi kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam percaturan masyarakat internasional. Diplomasi kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Selain itu definisi lain mengenai diplomasi kebudayaan adalah suatu teknik pemanfaatan dimensi kekayaan dalam percaturan hubungan antar  bangsa.[[17]](#footnote-18)**

Menurut S.L. Roy ada istilah yang lebih baku dari diplomasi kebudayaan yakni *diplomacy by cultural performance*. Namun khalayak banyak terlanjur menekankan istilah yang sederhana yaitu diplomasi kebudayaan untuk memberi pengertian bahwa diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik. Tetapi diplomasi dengan mengatasnamakan budaya tidak selalu harus dengan budaya kuno atau tradisional. Sebab pengambaran secara makro dari diplomasi kebudayaan adalah usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional melalui unsur kebudayaan termasuk didalamnya pemanafaatan bidang - bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, pendidikan, sosial budaya dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional.[[18]](#footnote-19)

Di dunia modern delegasi kebudayaan sering dikirim untuk membina hubungan baik dengan negara - negara lain yang bertindak sebagai duta pembawa semangat kebaikan dari negara mereka masing masing. Oleh karena itu pertukaran kebudayaan memungkinkan rakyat masing – masing untuk mengetahui pandangan satu sama lain dengan cara yang baik. Tujuan diplomatik dengan mengrimkan delegasi kebudayaan suatu bangsa adalah untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara dan apabila untuk mempengaruhi pendapat umum negara yang dikunjungi. Imbasnya adalah apabila suatu negara bisa mengesankan negara lain dengan warisan kebudayaanya dan mengekspornya ke bagian dunia lain hal itu bisa memudahkan pembangunan basis yang kuat untuk memperoleh dukungan atas masalah lainnya.

Seni dan budaya merupakan salah satu perangkat *soft power diplomacy* yang dapat mendukung hubungan masyarakat antar negara, dan memiliki bahasa universal yang dapat dipahami oleh seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan.[[19]](#footnote-20) Triyono meyakini bahwa diplomasi kebudayaan, seni dan budaya memberikan kontribusi yang positif dalam menciptakan perdamaian dunia, dan tercermin dalam semboyan “*a million friends and zero enemy*” melalui hubungan antar masyarakat yang kita kenal sebagai *“people to people contact*” dan dapat terjalin lebih jauh lagi. Oleh karena itu eksibisi kebudayaan dipandang lebih berguna dari pada pameran dengan menggunakan kekuatan militer.

Satu generasi sesudah ini akan lebih dipengaruhi oleh sebarapa baik kita mengkomunikasikan nilai - nilai masyarakat kita kepada negara lain. Masalah besar tentang bagaimana aspirasi umat manusia bisa dipenuhi sebaik – baiknya akan diputuskan dalampikiran manusia, tidak di medan pertempuran atau di meja konperensi. Sebab kebudayaan dianggap bisa menjadi penetrasi akan suatu kekuatan karena imprealisme kebudayaan merupakan suatu usaha untuk menaklukan dan menguasai jiwa manusia serta sebagai sebuah instrument untuk mengubah power antara kedua negara.[[20]](#footnote-21)

Hubungan kebudayaan bisa membawa pengaruh dua bangsa menjadi lebih dekat. Sebab hal ini diakui saat ini negara - negara di dunia tengah sibuk memaparkan hubungan kebudayaannya. Dengan cara menyelenggarakan program - program seperti pertukaran kebudayaan dan membangun pusat - pusat kebudayaan permanen di negara lain sehingga pusat pusat kebudayaan ini telah menjadi media diplomasi yang efektif.[[21]](#footnote-22)

Diplomasi kebudayaan dalam prospeknya memang tidak selalu menginprestasikan bahwa dampak atau hasil yang dicitakan akan terlaksana secara instan atau langsung. Jika dibandingkan dengan media cara seperti diplomasi konvensional (politik) yang target pencapainnya berupaya langsung mengenai pada sasaran elit negara / pemerintah dan berharap dampaknya juga diharapkan langsung dari pemerintah negara yang bersangkutan sedangkan diplomasi kebudayaan adalah usaha yang dilakukan dengan obyek sasaran seperti media massa, organisasi, instansi dsb bukannya pemerintah. Sehingga masuk akal bila dampak silang (*feed back)* dari diplomasi kebudayaan ini adalah *decision making* di negara mitra kerjasama.

Melihat apa yang telah dibangun oleh Indonesia dan Turki selama ini melalui hubungan bilateral, diharapkan mampu menjadi rival yang semakin solid dan bersahabat di tengah tantangan pusaran global. Dengan memanfaatkan diplomasi kebudayaan Indonesia sebagai negara dengan ragam cerita, bahasa, karakter dan nilai kesenian dituntut mampu mengemas bagaimana aset instrumen tersebut menjadi daya tarik untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat bahkan pemerintah Turki tentang Indonesia. Sehingga lobi – lobi dipomasi dan tujuan kepentingan nasional negara dapat dilaksanakan dengan baik dan stabil dengan dukungan antusias penuh dari negara Turki.

Eksibisi kebudayaan sering lebih berguna daripada pameran kekuatan militer. Inilah mengapa J.W. Fulbright berkomentar “bentuk dunia , satu generasi sesudah ini akan lebih dipengaruhi oleh seberapa baik kita mengkomunikasikan nilai – nilai masyarakat kita kepada negara lain”. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian aspirasi umat manusia bisa dipenuhi sebaik – baiknya akan diputuskan difikaran manusia, tidak di medan tempur atau di meja konperensi.

Ekspansi intelektual dan moral (nilai – nilai budaya) kapan saja memungkinkan penetrasi kebudayaan akan menjadi suatu kekuatan. Aspirasi politik dan invasi militer apa yang pernah berhasil, dengan pengorbanan yang sedikit untuk memperoleh hasil-hasil yang demikian penting dan bersifat jangka panjang. Karena imprealisme kebudayaan merupakan suatu usaha untuk menaklukan dan menguasai jiwa manusia serta sebagai sebuah instrumen untuk mengubah hubungan *power* antar negara.

Hubungan kerjasama yang dapat dibangun dengan landasan nilai – nilai kebudayaan bisa banyak membawa dua negara menjadi lebih dekat. Hal ini yang kemudian menyebabkan Negara Indonesia untuk dewasa sekarang ini sibuk mengedepankan hubungan – hubungan kebudayaan. Seperti menyelenggarakan program – program pertukaran kebudayaan, festival kebudayaaan internasional, pertunjukan seni maupun drama dan membangun pusat – pusat kebudayaan permanen di negara lain. Pusat dan aktifitas kebudayaan inilah yang telah menjadi alat diplomasi yang efektif.

1. [Tugino thok](https://plus.google.com/107074212120407336164), Politik Luar Negeri Indonesia, http:// <http://mastugino.blogspot.co.id/2012/11/politik-luar-negeri-indonesia.html> . Diakses pada tanggal 14 September 2016 [↑](#footnote-ref-2)
2. Richsrd Snyder et.al. (eds), *Foreign Policy Makin; The Free Press of Glencoe*, USA, 1962, hlm. 60-70 [↑](#footnote-ref-3)
3. Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *International Politics*, The Macmillan Company, New York, 1960, hal. 309 [↑](#footnote-ref-4)
4. KJ. Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangkan Anlisis*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 32 [↑](#footnote-ref-5)
5. Nasrun Mappa, *Indonesia International Relation With The South Pasific Countries: Prospect And Problems,* UNHAS, Makassar. 1990, Hal. 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Daniel S Papp, *Contemporary, International Relation – Framework for Undestanding-:* Mcmillan Publishing Company, New York *1998,* hal. 29 [↑](#footnote-ref-7)
7. Roy S.L. *Diplomasi.* CV Rajawali. Jakarta. 1991. Hal 1 [↑](#footnote-ref-8)
8. arthasastra, IV. 2 [↑](#footnote-ref-9)
9. //http.wordpress.com. isu hubungan internasional. diplomasi poblik. Diakses pada hari Kamis, 28 Juli 2011 puku18.00 Wita [↑](#footnote-ref-10)
10. Diplomasi track pertama mengacu pada aktivitas-aktivitas remi yang dilakukan oleh diplomat dan wakil – wakil pemerintah, sedangkan track kedua dan seterusnya lebih banyak melibatkan aktivias-aktivitas publik. Diplomasi publik beciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bersifat informal, dan merupakan bentuk tidak resmi dalam memecahkan masalah dengan cara menurunkan ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan menigkatkan saling pengertian. Lihat Barry Fulton,op.cit. [↑](#footnote-ref-11)
11. George P. Shulz : *Keynote address from the virtual diplomacy confrence: The Information Revolution and International Conflict Management.* Peaceworks 18 September 1997. Lihat : http://www.usip.org/pubs/virtual18/vdip\_18html. [↑](#footnote-ref-12)
12. Public Diplomacy in Change World, US Advisory Commission on Public Diplomacy, Washington D.C, October 1993. [↑](#footnote-ref-13)
13. Diamond Louise, ‘*Multi-Track Diplomacy - A Systems Approach to Peace*’ *Third Edition*, Kumarian Press, hal 12 - 59 [↑](#footnote-ref-14)
14. Barry Fulton, Reinventing Diplomacy in Information Age, CSIS, Washington D.C, 1998 at http//www.csis.org/ics/dia/ [↑](#footnote-ref-15)
15. Harold Nicholson, Diplomacy Then and Now; dalam Theory and Practice of International Relation 2nd Edition, Prentice Hall, Englewood, NJ, 1974 [↑](#footnote-ref-16)
16. Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 172. [↑](#footnote-ref-17)
17. Wahyuni Kartika, Diplomasi Kebudayaan: Diktat Kuliah, Ombak. Fisipol, UMY, 2006, [↑](#footnote-ref-18)
18. S.I. Roy, op.cit.,hal. 4 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sumber: Direktorat Diplomasi Publik/EPMM) Triyono Wibowo dalam pidato pembukaan Indonesia **Seni dan Budaya Sebagai 'Soft PowerDiplomacy'** Channel 2011 di Hotel Eldorado, Bandung,29/7 2011 [↑](#footnote-ref-20)
20. Phillip h coombs fourth dimension of foreign policy hlm. 79 [↑](#footnote-ref-21)
21. kira kira 2300 tahun yang lalu asoka kaisar maurya yang Agung telah menyadari betapa pentingnya mengirim misi misi kebudayaan ke berbagai negara. Misi misi budaya yang dikirim asoka ke luar negeri telah mengangkat martabat Maurya. [↑](#footnote-ref-22)